RESISTENSI NELAYAN DESA WARULOR KEC. PACIRAN KAB. LAMONGAN TERHADAP PERMEN KP NOMOR 2 TAHUN 2015

Siti Robiatul Adawiyah

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya Robiahsiti248@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang resistensi masyarakat nelayan Desa Warulor terhadap Nomor 2/Permen-KP/2015. Nelayan Desa Warulor sudah puluhan tahun menggunakan alat payang yang masuk kategori pukat tarik. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui agen-agen, alasan yang mendorong resistensi. Selain itu juga bentuk resistensi ada dilakukan oleh nelayan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif James Scott. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agen yang terlibat adalah semua kategori nelayan paying. Dalam hal ini baik nelayan biasa maupun yang tergabung dalam Rukun Nelayan. Bahkan juga nelayan yang menjabat sebagai pengurus HNSI. Alasan nelayan melakukan resistensi diantaranya faktor ekonomi/pendapatan, keefektifan, dan sedikitnya biaya perawatan. Tindakan yang termasuk resistensi tertutup adalah menggunakan payang sehari-hari, pura-pura patuh pada Polair. Sedangkan kategori resistensi semi terbuka adalah nelayan tidak mengurus pembuatan SIPI, menolak bantuan. Disamping itu nelayan juga mewakilkan aksi demonstrasi, dan kejar-kejaran dengan Polair saat ada razia.

Kata Kunci : Nelayan, Payang, Resistensi, Nomor 2/Permen-KP/2015

Abstract

This study discusses the resistance of the fishing community of Warulor Village to Number 2 / Permen-KP / 2015. Warulor Village fishermen have used the payang tool in the trawl category for decades. The purpose of this study is to find out the agents, the reasons that drive resistance. In addition, the form of resistance is carried out by fishermen. This study uses a qualitative approach with James Scott's perspective. The results showed that the agents involved were all categories of paying fishermen. In this case both ordinary fishermen and those who are members of the Fishermen's Association. Even fishermen who served as administrators of HNSI. The reasons for fishermen doing resistance include economic / income factors, effectiveness, and minimal maintenance costs. Actions that include closed resistance are using everyday clothes, pretending to obey Polair. While the semi-open resistance category is that fishermen do not take care of making SIPI, refuse assistance. Besides that fishermen also represented demonstrations, and chased Polair when there were raids.

Keywords: Fishermen, Payang, Resistance, Number 2 / Permen-KP / 2015

PENDAHULUAN

Indonesia Negara merupakan negara kepulauan yang didalamnya menyimpan banyak sekali keragaman hayati. Kekayaan alam yang tersimpan di perairan laut Indonesia itu harus dijaga kelestariannya. Hal ini supaya tidak mengancam kelestarian ekosistem jangka panjang. Dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan RI bertanggung jawab untuk melindungi potensi kekayaan ekosistem laut Indonesia. Pemerintah selalu mengawasi setiap kegiatan pemanfaatan ekosistem laut, khususnya kegiatan penangkapan ikan. Kegiatan illegal fishing sangat merugikan pemerintah Indonesia. Kegiatan ini biasanya dilakukan negara lain yang mengambil kekayaan laut Indonesia tanpa izin dari pemerintah. Illegal fishing yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yakni menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (Jaelani,2014). Illegal fishing dapat menyebabkan penurunan kualitas maupun kuantitas ikan yang ada di wilayah perairan Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Ibu Susi Poedjiastuti pada awal tahun 2015 mengeluarkan kebijakan Nomor 2/Permen-KP/2015. Kebiajakan tersebut berisi tentang larangan menggunakan pukat hela dan pukat tarik untuk dioperasikan di Indonesia. Beberapa alat yang masuk kategori pukat tarik adalah dogol, payang, purse seine, cantrang, dan lampara dasar. Pukat hela dibagi atas tiga kategori, pukat hela dasar, pertengahan, kembar berpapan, serta pukat dorong. Latar belakang pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut tentunya disertai dengan harapan serta tujuan. Tujuannya yakni untuk mendukung keberlangsungan sumber daya laut jangka panjang. Juga sebagai langkah untuk mendukung negara Indonesia sebagai poros maritim dunia (Puryono,2016).

Terbitnya Nomor 2/Permen-KP/2015 banyak menuai aksi pro-kontra dari masyarakat nelayan di Indonesia. Berita online menyebutkan ada sebanyak 600 nelayan dari Kabupaten Tegal Jawa Tengah melakukan aksi dukungan. Alat tangkap cantrang sering kali tersangkut dan merusak jaring milik nelayan tradisional. Nelayan dari Lampung juga melakukan aksi dukungan pemerintah. Menurutnya, keberadaan alat tangkap dianggap

merusak terumbu karang yang berdampak pada pendapatan nelayan kecil (Kumparannews, 2017). Aksi dukungan terhadap pemerintah juga dilakukan nelayan Masalembu. Nelayan Masalembu dengan terang-terangan mengatakan jika menggunakan alat cantrang itu hukumnya haram (Kumparanbisnis, 2017). Kebijakan Permen KP No.2 tahun 2015 mayoritas didukung oleh nelayan tradisional yang ada diberbagai daerah. Indikator nelayan tradisional adalah nelayan yang masih menggunakan alat tangkap sederhana dan tidak menggunakan mesin. Beberapa alat tangkap nelayan tradisional antara lain adalah jaring, jala, bubu. Sedangkan untuk nelayan modern ditandai dengan pemanfaatan teknologi mesin untuk melaut sehari-hari (Arisandi, 2016).

Nelayan yang menolak Permen Kp No.2 tahun 2015, juga tidak tinggal diam terhadap keputusan pemerintah. Sejak tahun 2018 terhitung sudah terjadi dua kali demo yang dilakukan oleh para nelayan. Demonstrasi tersebut mendesak pemerintah untuk mencabut Permen Kp No.2 tahun 2015. Demonstrasi pertama pada 8 Januari 2018 di jalur Kabupaten Lamongan. Sedangkan demonstrasi kedua dilakukan di depan istana negara pada 17 Januari oleh puluhan ribu nelayan (Detikfinance, 2017). Bersamaan dengan demonstrasi nelayan tersebut, Presiden ditemani oleh Ibu Susi selaku Menteri Kelautan dan Perikanan RI, serta beberapa bupati dan aliansi nelayan bertemu untuk membicarakan masalah Permen KP no. 2 tahun 2015 (Suara.com, 2018). Konferensi pers menyebutkan bahwa pemerintah tidak akan mencabut kebijakan Namun pemerintah memberikan perpanjangan waktu kepada nelayan untuk berganti alat tangkap dengan beberapa syarat. Catatan tidak ada penambahan alat tangkap, dan memperbolehkan alat cantrang hanya di wilayah Pantura saja (Liputan6.com, 2018).

Alasan peneliti memilih lokasi dikarenakan Kabupaten Lamongan sebagai barometer nelayan di Indonesia dengan jumlah nelayan terbanyak. Jumlah masyarakat yang bekerja di sektor perairan sebanyak 14.032 orang, buruh nelayan sebanyak 33 orang, dan 72 orang bekerja sebagai pelaut (BPS. Lamongan, 2016). Sedangkan data BPS Lamongan tahun (2015) menyebutkan ada sekitar 3.263 perahu dengan berbagai ukuran yang ada di Kabupaten Lamongan. Dari jumlah tersebut, 1.021 perahu berada di Desa Weru komplek.

Apridar, dkk (2011) menyebutkan bahwa dalam masyarakat nelayan terdapat stratifikasi sosial. Desa Warulor yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan terbagi dalam beberapa kelas. Kelas tersebut adalah nelayan pemilik, nelayan juragan, nelayan buruh atau *belah*, dan nelayan tanpa ABK. Jika dilihat dari waktu melaut, ada dua jenis nelayan yakni berangkat malam hari, dan pagi hari. Sedangkan berdasarkan jenis alat tangkap yang digunakan ada nelayan *mayang*, *njaring*, *dan ngursin*.

Alat payang masuk kategori pukat tarik dalam Permen KP no.2 tahun 2015. Nelayan Desa Warulor sudah menggunakan payang sejak puluhan tahun yang lalu, tepatnya sekitar tahun 90.an. Tidak heran jika sampai saat ini nelayan payang enggan untuk berganti alat tangkap yang disarankan oleh pemerintah. Bahkan nelayan yang sebelumnya menggunakan jaring purse seine maupun jaring tradisional, perlahan berganti ke alat payang. nelayan tidak takut pada pemerintah kaerona orientasinya adalah hasil dan keuntungan. Fokus penelitian ini terletak pada siapa saja agen yang melakukan resistensi. Kedua, bentuk-bentuk resistensi apa yang dilakukan oleh agen nelayan menggunakan perspektif resistensi James Scott. Ketiga, mendeskripsikan apa alasan yang mendorong nelayan untuk melakukan resistensi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif James Scott. Peneliti mengambil lokasi di Desa Warulor Kec. Paciran Kab. Lamongan. Subjek penelitian adalah nelayan boat dan pincuk, ketua Rukun Nelayan (RN), dan perwakilan dari HNSI. Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer di peroleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder dikumpulkan data-data yang sudah ada dilapangan, serta hasil riset yang pernah diteliti. Penelitian ini menggunakan analisis data Miles dan Huberman. Teknik analisis meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian atau model data, dan pengambilan keputusan. Penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi pada sumber data guna meminimalisir adanya bias data.

PEMBAHASAN

berdasarkan fokus penelitian, maka dalam penelitian akan menjawab siapa saja agen yang terlibat dalam resistesi. Alasan dan faktor yang mendorong nelayan melakukan resistensi, serta bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan oleh nelayan.

Agen Yang Melakukan Resistensi

Penggunaan istilah agen dikarenakan agen merupakan pihak yang mempunyai kemamuan untuk melakukan penolakan. Selain itu agen memiliki alasan tersendiri yang mendasari tindakannya. Menggunakan konsep agen menurut Giddens, maka nelayan Desa Warulor tergolong memiliki kesadaran diskursif. Agen nelayan bukan hanya menerima keputusan dari pemerintah, melainkan mereka mempunyai kemampuan untuk mempertanyakan terkait kebijakan. Agen nelayan di Desa Warulor yang melakukan resistensi terdiri dari semua jenis nelayan payang. Baik yang menggunakan perahu boat maupun pincuk, nelayan besar, maupun nelayan kecil yang melaut sendirian. Dalam hal ini juga ditemukan

fakta bahwa perwakilan pengurus dari HNSI Lamongan juga ada yang melakukan resistensi. Bentuk resistensinya dengan menggunakan payang untuk melaut sehari-hari. Menjadi menarik dikarenakan pengurus HNSI yang pro pemerintahpun diam-diam juga melakukan perlawanan terselubung.

Faktor Yang Mendorong Resistensi

Beberapa faktor yang mendorong nelayan masih mempertahankan payang yang sebenarnya dilarang oleh pemeritah. Faktor tersebut antara lain faktor budaya, sosial, agama, dan ekonomi. Faktor budaya merupakan faktor pendorong yang sudah lama hidup dan berkembang di masyarakat. Banyak faktor budaya yang mendorong nelayan mempertahankan payang. Pertama, bekerja sebagai nelayan dianggap sebagai pekerjaan turun-temurun dari nenek moyang. Kedua, adanya mentalitas bahwa anak laki-laki yang hidup di pesisir adalah calon nelayan.

Ketiga, di Desa Warulor masih terdapat kearifan lokal 'Wong lanang mbesok bakal e njegur nggoro'. Ungkapan itu artinya 'anak laki-laki kelak bakal turun ke laut. Ungkapan atau kearifan lokal ini tentu berpengaruh terhadap mentalitas anak laki-laki di Desa Warulor. Anggapan untuk tidak susah payah menempuh pendidikan tinggi karena menjadi nelayan tidak membutuhkan ijazah.

Local wisdom kedua, 'luweh enak mangan uwi nang omah dewe timbang mangan roti nang omah e uwong'. Artinya 'lebih baik makan ubi di rumah, dari pada makan roti di rumah orang lain'. Local Wisdom tersebut berpegaruh pada tingkat urbanisasi dan mobilitas sosial. Kesederhanaan dan sikap nerimo ing pandum yang dianut oleh masyarakat bisa menjadi penghambat untuk melakukan mobilisasi. hal ini dikarenakan nelayan sudah cukup puas dengan kehidupan yang dijalani. Sehingga mereka tidak melirik pekerjaan lain diluar nelayan yang lebih menjanjikan kesuksesan.

Faktor sosial yang mendorong masyarakat nelayan melakukan resistensi adalah kondisi sosialnya. Sebagian besar masyarakat nelayan yang ada di Warulor itu merupakan keluarga menengah kebawah. Tingkat pendidikan nelayan yang rendah membuatnya susah beralih status dan tidak mudah menerima perubahan atau bujukan dari pemerintah. Pendidikan yang rendah ini dipengaruhi oleh anggapan bahwa menjadi nelayan membutuhkan sekolah tinggi. Menjadi nelayan tidak perlu susah payah mengikuti tes seleksi kerja karena sudah pasti langsung bekerja. Pendidikan juga mempengaruhi pola pikir nelayan dalam menentukan keputusannya. Sampai sejauh ini, pola pikir mengenai indikator kesuksesan adalah materi. Itulah sebabnya nelavan terkesan memiliki alasan pembelaan sendiri terhadap keputusannya untuk tetap menggunakan payang.

Faktor sosial lainnya adalah ketidaktegasan pemerintah terkait dengan legalitas payang. Polair melakukan razia saat ada laporan dari nelayan tradisional yang merasa ditindas oleh nelayan payang. Hal ini semata-mata untuk meredahkan konflik yang terjadi antar nelayan. Hasil riset ini memperkuat riset sebelumnya yang dilakukan oleh Arisandi (2016). Arisandi meneliti tentang inkonsistensi kebijakan PERMEN KP No. 2 Tahun 2015 di wilayah perairan Gresik. Hasil dari penelitian Arisandi tersebut mengungkapkan beberapa fakta. Pertama, Permen KP No. 2 tahun 2015 tidak begitu berdampak terhadap berkurangnya nelayan yang menggunakan alat terlarang. Kedua, pemerintah dalam menjalankan tugasnya masih terkesan mengalah dan akhirnya memberikan toleransi kepada nelayan.

Penelitian ini juga bisa memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Firhat Sauqi. Sauqi (2016) meneliti penerapan PERMEN KP tahun 2015 di Kabupaten Lamongan. Hasil riset ini menyebutkan bahwa alat tangkap pukat hela dan pukat tarik dinilai tidak selektif. Payang mempunyai lubang jaring yang ukurannya sangat kecil yakni ¾ inch. Lubang jaring payang yang bisa menjaring semua jenis dan ukuran ikan. Kedua, fakta bahwa PERMEN KP No.2 tahun 2015 itu mengalami penolakan sekitar 80% nelayan Lamongan. Kebijakan tersebut dianggap tidak pro terhadap nelayan kecil. pemerintah masih belum bisa menawarkan solusi berupa alat tangkap yang bisa menandingi alat milik nelayan.

Masyarakat Desa Warulor seluruhnya beragama islam, dengan dua Ormas besar yakni NU dan Muhammadiyah. Nelayan menggunakan dalil agama yang dijadikannya sebagai legitimisi untuk tetap menggunakan alat yang berstatus terlarang. Anggapan bahwa 'laut tidak akan pernah berubah' nampaknya masih diyakini oleh mayoritas nelayan Desa Warulor. Nelayan mengatakan jika laut dari zaman dulu sampai besok akan tetap sama. Laut tidak ada yang berubah meskipun sudah ratusan tahun dikuras hasilnya oleh alat tangkap yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan Laut adalah salah satu kenikmatan Allah, dan kenikmatan Allah tidak akan pernah habis. Hal ini sebagaimana terungkap dalam salah satu firman Allah dalam Q.S An-nahl ayat 18. Firman tersebut artinya "Dan jika kamu menghitunghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". Begitu pula dengan firman Allah dalam Surat Ibrahim ayat 34 yang artinya berbunyi "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghinggakannya".

Faktor Ekonomi juga menjadi salah satu faktor penting yang mendorong nelayan. Faktor ekonomi meliputi beberapa poin diantaranya adalah pekerjaan, besar kecilnya pendapatan, jumlah kebutuhan yang harus kepenuhi, dan juga pola konsumsi. Pendapatan rata-rata nelayan yang ada di Desa Warulor juga cukup bervariasi. Bagi nelayan pincuk dan nelayan boat yang melaut sendirian pendapatan setiap melaut normalnya berkisar antara Rp.150.000. Sedangkan saat cuaca mendukung bisa

mencapai nominal Rp. 250.000. Bagi nelayan boat yang mempekerjakan ABK akan mendapat hasil bersih sekitar Rp.300.000 s.d Rp.400.000, dengan bagian per ABK kisaran Rp.150.000. Pengeluaran rumah tangga setiap harinya berkisar pada nomial Rp.100.000. Jika dilihat selisih dari pendapatan dan pegeluaran, bisa disimpulkan bahwa masyarakat nelayan ini berada kondisi ekonomi yang cukup.

Alasan Nelayan Mempertahankan Payang

Dari beberapa subjek penelitian, diperoleh beberapa alasan yang mendasari nelayan untuk bertahan di alat payang. Alasan utama adalah pendapatan dari payang yang dirasa paling bisa untuk mencukupi kebutuhan nelayan. Sampai saat ini belum ada alat yang hasilya bisa menandingi hasil dari payang. Alasan-alasan lainnya adalah pengoperasian payang dinilai jauh lebih efektif dari pada alat lain. Ukuran payang bisa menyesuaiakan ukuran perahu dan tenaga ABK, harga dpembuatan payang yang tergolong murah. Harga pembuatannya hanya berkisar antara 1,5 s.d 3 juta rupiah. Payang juga tidak membutuhkan biaya perawatan yang mahal. Selain itu faktor perbedaan kondisi laut jawa yang berbeda dengan kondisi di luar jawa. Perbedaan kondisi itu sehingga alatnya tidak bisa dipukul sama rata.

Bentuk Resistensi Nelayan terhadap Permen KP No.2 Tahun 2015 dalam Perspektif Scottian

Perlawanan yang dilakukan oleh nelayan itu semata-mata sebagai salah satu usaha untuk tetap bertahan hidup. Bertahan ditengah banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh keluarga dan biaya pendidikan anak. Resistensi bertujuan untuk menolak atau menentang kebijakan yang berasal dari kelas dominan yang diajukan ke kelas bawah. Resistensi juga bisa digunakan untuk memperkecil tuntutan kepada pemerintah yang diajkan kepada masyarakat bawah (Scott, 1993).

Scott menyebutkan tiga bentuk resistensi yang ada masyarakat yakni resistensi tertutup, semi terbuka, dan terbuka. Resistensi tertutup bisa berupa gosip, fitnah terhadap suatu kelas, bisa juga berarti penolakan terhadap kebijakan yang dipaksakan, bisa juga dalam bentuk penarikan rasa hormat terhadap aparatur negara atau kelas dominan (Scott,303:1993). Resistensi tertutup biasanya dilakukan secara terselubung, diam-diam, dan setiap hari, tidak memerlukan organisasi atau kelompok, tidak sistematis, dan tidak mempunyai akibat yang revolusioner.

Tindakan nelayan yang termasuk dalam resistensi tertutup adalah menggunakan alat payang untuk melaut sehari-hari. Menggunakan alat payang termasuk melanggar pasal 4 Permen KP no.2 tahun 2015. Keputusan nelayan untuk tetap menggunakan payang ini nampaknya sudah menjadi keputusan yang bulat. Nelayan juga mengaku tidak ada rasa takut dengan Polair yang biasanya bertugas merazia

nalayan di laut. Nelayan melawan rasa takut terhadap hukum dikarenakan faktor dorongan kebutuhan keluarga. Tindakan lain yang masuk resistensi tertutup adalah nelayan yang berpura-pura patuh pada Polair ketika tertangkap. Nelayan seakan patuh dan menuruti semua yang disaankan oleh Polair ketika ada di kantor polisi. Namun ketika sudah pulang, semua saran dan masukan dari Polair itu seakan tidak pernah mereka dengar. Setelah tertangkap nelayan tetap akan membuat payang yang baru.

Resistensi semi terbuka bisa dilakukan oleh perorangan atau kelompok untuk memperoleh keuntungan jangka panjang. Pemogokan, pemboikotan, penolakan namun tidak melibatkan kekerasan adalah salah satu bentuk resistensi semi terbuka. Beberapa tindakan nelayan kategori resistensi semi terbuka adalah masih banyak nelayan tak sengaja tidak membuat SIPI (Surat Izin Penagkapan Ikan) yang diwajibkan dalam pasal 1 Permen KP No. 2 tahun 2015. Alasan nelayan tidak membuat SIPI dikarenakan merasa SIPI tidak penting. Ada juga yang beranggapan bahwa SIPI hanya untuk nelayan besar dengan jarak tempuh yang relatif jauh. Nelayan juga dengan sengaja menolak bantuan alat tangkap dari pemerintah. Alat tangkap yang disebut sebagai pengganti payang itu ditolak oleh nelayan Warulor. Penolakan itu karena mereka takut ketika menerima bantuan alat tersebut, maka payang akan resmi dilarang.

Meskipun nelayan Warulor tidak langsung demonstrasi ke Jakarta, namun mereka mewakilkan nama. Nelayan mendukung aksi nelayan Blimbing Brondong yang berangkat ke Jakarta pada awal tahun 2018 lalu. Tindakan resistensi semi terbuka lainnya adalah aksi kejar-kejaran antara nelayan dan Polair yang melakukan razia ditengah laut. Hampir setiap nelayan pernah merasakan pengalaman dikejar oleh Polair saat mencar nafkah. Karena terlalu sering dihadapkan pada razia, mayoritas nelayan sudah hafal dengan tanda-tanda adanya razia mendadak. Tanda tersebut antara lain terdengar suara mesin kapal yang terdengar cukup keras dan bersautan. Hal ini menandakan perahu nelayan yang berjalan dengan sangat cepat sehingga mesin terpacu lebih keras suaranya. Selain itu tanda adanya razia adalah terdapat kapal dari kejauhan yang berjalan sangat cepat. Kapal sekoci milik Polair memiliki kecepatan diatas rata-rata perahu nelayan. Nelayan memiliki simbol untuk memberi tahu rekannya saat ada razia. Simbol itu dengan mengobatabitkan sarung dari jarak jauh. Simbol itu menandakan ada razia supaya bergegas untuk menghentikan aktivitas dan menyelamatkan diri.

Tabel	1.	Kategori	R	Resistens	si
-------	----	----------	---	-----------	----

Bentuk Resistensi	Jenis Tindakan		
Tertutup	menggunakan payang untuk melut sehari-hari		
	pura-pura patuh pada Polair		
Semi	Tidak memiliki SIPI /SIUP		
terbuka	Menolak bantuan alat tangkap dari pemerintah		
	mewakilkan aksi demonstrasi		
	kejar-kejaran antara nelayan dan Polair saat ada razia di laut		

PENUTUP

Nelayan yang mempertahankan payang didorong oleh faktor budaya, sosial, agama, dan ekonomi. Fakta bahwa nelayan adalah pekerjaan warisan turun temurun dari nenek moyang. Menjadi nelayan tidak butuh pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan masyarakat rendah sehingga menghambat proses mobilisasi sosial. Adanya dalil agama dalam O.S An-nahl avat 18 dan Surat Ibrahim avat 34 yang melegitimasi tindakan resistensi. Alasan nelayan memilih payang adalah belum ada alat tangkap yang hasilnya bisa menandingi hasil payang. Payang juga sangat efektif pengoperasiannya, dan tidak menghabiskan tenaga serta biaya perawatan. Disamping itu ukuran dari payang juga bisa menyesuaikan ukuran perahu dan tenaga ABK. Serta alat payang itu alat yang cocok dioperasikan di laut Jawa.

Berkaitan dengan resistensi nelayan di Desa Warulor ini termasuk dalam resistensi tertutup dan resistensi semi terbuka. Tindakan yang termasuk dalam resistensi tertutup yaitu menggunakan alat payang untuk melaut sehari-hari, pura-pura patuh pada Polair saat tertangkap razia. Sedangkan tindakan resistesi semi terbuka yang dilakukan nelayan adalah tidak memiliki SIPI. Penolakan bantuan alat tangkap dari pemerintah, serta mewakilkan aksi demonstrasi, kejar-kejaran dengan Polair saat ada razia di laut. Nelayan yang turut melakukan resistensi adalah kelompok nelayan payang dari berbagai jenis ukuran perahu. Selain itu juga pengurus Rukun Nelayan, bahkan beberapa dari jajaran pengurus HNSI Lamongan.

DAFTAR PUSTAKA

Apridar, dkk. 2011. *Ekonomi Kelautan dan Pesisir*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Arisandi.2016."Inkonsistensi Kebijakan Penggunaan Jaring Trawl". *JKMP(ISSN.2338-445) Vol. 4 No.1, Maret 2016.* Di akses tanggal 17 Oktober 2017.

BPS Kabupaten Lamongan. 2015. Jumlah Perahu/Kapal Menurut PPI dan Jenis Kapal di Kabupaten Lamongan, 2015. BPS Kabupaten Lamongan. 2016. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan/Profesi di Kabupaten Lamongan, 2016.

Jaelani, Abdul Kadir. 2014. "Illegal Unreported And Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah Dan Memberantas Illegal Fishing Dalam Membangun Poros Martim Indonesia". Supremasi Hukum Vol. 3,No. 1 Juni 2104.

Kumparanbisnis. 2017. *Ribuan Nelayan Masalembu Dukung Susi : Cantrang Haram.* (Online). (https://kumparan.com/@kumparanbisnis/ribuan-nelayan-masalembu-dukung-susicantrang-itu-haram). Diakses tanggal 19 april 2018.

Liputan6.com. 2018. "Headline: menteri susi bolehkan cantrang, nelayan masih galau". (0nline). (
http://bisnis.liputan6.com/read/3230886/head line-menteri-susi-bolehkan-cantrang-nelayan-masih-galau?source=search_Diakses pada tanggal 21 Februari 2018.

PERMEN-KP No. 2 Tahun 2015

Puryono, Sri. 2016.*Mengelola Laut Untuk Kesejahteraan Rakyat*.Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Scott, James C. 1993. "Perlawanan Kaum Tani". Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Suara.com. 2018. Intervensi Presiden Akhiri Pro-Kontra larangan Cantrang. (Online). (https://www.suara.com/news/2018/01/21/06 4500/intervensi-presiden-akhiri-pro-kontralarangan-cantrang). Diakses pada 19 april 2018.

Syauqi, Firhat.2016."Penerapan Peraturan Menterri Kelautan Dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Kabupaten Lamongan". FM-UINSK-BM-05-02/RO

